

## Evaluasi Pendidik Keaksaraan Dasar sebagai Agen Perubahan Sosial

Apriyanti Wulandari

[apriyanti.wulandari@kemdikbud.go.id](mailto:apriyanti.wulandari@kemdikbud.go.id)

Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud

### ABSTRACT

*Literacy is not limited to the ability to read, write, and arithmetic, but also the application of that ability to enhance the quality of life. The purpose of this study is to evaluate the role of literacy educators as agents of social change. This research is based on evaluation model with Change Model approach. The population of this study are the educators in the two institutes of basic literacy education program in Cirebon Regency. The results of this study showed that basic literacy educators have not received appropriate compensation so that their paradigm as an agent of social change has not yet been arised. Researchers recommend to reorganize the training system that has been implemented so that they get recognition from the government.*

**Keywords:** *evaluation, educator, basic literacy, social change*

### ABSTRAK

Keaksaraan tidak sebatas kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, tapi juga aplikasi dari kemampuan tersebut untuk peningkatankualitas hidup. Tujuan dari penelitian ini adalah mengevaluasi peran pendidik keaksaraan sebagai agen perubahan sosial. Penelitian ini didasarkan pada model evaluasi dengan pendekatan *Change Model*. Adapun populasi penelitian ini adalah para pendidik di dua lembaga penyelenggara program pendidikan keaksaraan dasar di Kabupaten Cirebon. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendidik keaksaraan dasar belum mendapatkan kompensasi yang sesuai sehingga paradigma mereka sebagai agen perubahan sosial belum terbentuk. Peneliti merekomendasikan untuk menata ulang sistem pelatihan yang selama ini dilaksanakan agar para pendidik keaksaraan dasar tersebut mendapat pengakuan dari pemerintah.

**Kata Kunci:** evaluasi, pendidik, keaksaraan dasar, perubahan sosial

---

### PENDAHULUAN

Upaya pemberantasan buta aksara sudah dilaksanakan pemerintah Indonesia sejak tahun 1945 dengan gerakan Pemberantasan Buta Huruf (PBH) yang saat ini melalui pendidikan keaksaraan, baik keaksaraan dasar maupun lanjutan. Indonesia setidaknya masih memiliki 5.984.075 orang penduduk buta aksara pada tahun 2014 [1]. Jumlah ini relatif kecil bila dibandingkan dengan total penduduk Indonesia tahun 2014 yang berjumlah 252,2 juta orang (Statistik Indonesia).

Karena jumlahnya yang relatif kecil, mereka menjadi kelompok yang marginal dalam masyarakat, sehingga upaya pendataan saja sudah mendapatkan kendala terlebih layanan pendidikan kepada mereka. Orang dewasa dengan tingkat melek huruf rendah cukup dirugikan dan dikucilkan dalam bidang sosial, politik dan ekonomi. Untuk itu, tingkat melek huruf merupakan hak asasi manusia [2].

Pemerintah sebagai insiator dan fasilitator program selama ini masih

terfokus menjalankan praktik keaksaraan yang bersifat struktural, daripada menggunakan pendekatan fungsional. Peran pendidik sebagai faktor penentu utama kurang mendapatkan perhatian. Demikian pula dengan pengenalan lebih baik peserta didik yang menjadi sasaran program. Secara desain, pendidikan keaksaraan dasar sudah dirancang dengan baik, hanya saja praktiknya belum sesuai dengan yang diharapkan.

Keaksaraan tidak cukup sebatas kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Keaksaraan sebagai kunci untuk mendapatkan pengetahuan untuk dapat memahami realitas dan lingkungan sekitar. Melalui keaksaraan ini diharapkan perubahan pola pikir peserta didik menjadi kritis dalam mengenali diri, masyarakat dan lingkungannya. Selanjutnya dapat mengungkap cara-cara yang menguntungkan bagi diri sendiri maupun masyarakatnya [2].

Untuk dapat mengubah pola pikir peserta didik, maka dibutuhkan pendidik yang mampu memfasilitasi perubahan ini. Ada banyak tuntutan dan harapan terhadap pendidik keaksaraan dasar sebagai pelaksana program. Melalui penelitian ini, akan didapatkan gambaran peran pendidik keaksaraan saat ini dan upaya apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah sebagai pihak yang paling berkepentingan untuk memberdayakan pendidik keaksaraan dasar agar dapat bertindak sebagai agen perubahan. Bagaimana pendidik dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kesadaran sebagai warga negara yang bertanggung jawab untuk kritis terhadap hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Tantangan terbesar pendidik adalah heterogenitas orang-orang yang dilayani, tingkat keterampilan yang diatasi, konteks di mana keaksaraan diajarkan, dan pengaturan di mana program ditempatkan [3].

Evaluasi terhadap pendidik keaksaraan dasar dilakukan untuk memberikan dukungan data mengenai peran pendidik terhadap pelaksanaan pendidikan keaksaraan selama ini. Masalah dan tantangan yang dialami oleh pendidik sebagai dasar bagi pengambil kebijakan untuk perbaikan program di masa datang.

## **KAJIAN LITERATUR**

### **Evaluasi**

Suatu program dievaluasi secara umum untuk memberikan jawaban dalam dua hal, yaitu untuk mencapai tujuan atau mempertahankannya. Rossi, Lipsey, dan Freeman [4] menuliskan evaluasi program melibatkan “penggunaan metode penelitian sosial untuk secara sistematis menyelidiki efektivitas intervensi suatu program sosial dengan cara-cara yang disesuaikan dengan politik mereka dan lingkungan organisasi dan dirancang untuk menginformasikan aksi sosial untuk memperbaiki kondisi sosial”.

Menentukan fakta atas sesuatu (termasuk akibatnya) merupakan informasi yang ingin dicapai melalui evaluasi. Namun ini bukanlah hal yang mudah. Umumnya evaluasi dinyatakan dalam suatu simpulan yang umum yang menyatakan pencapaian program dalam berbagai kriteria, antara lain baik/buruk, bagus/buruk, layak/tidak, tercapai/tidak, dan lain sebagainya.

Evaluasi pendidikan ditujukan untuk membantu pengambil kebijakan untuk melaksanakan suatu program pendidikan dengan lebih baik. Evaluasi pendidikan perlu mempertimbangkan 3 aspek, yaitu orientasi politik pengambil kebijakan, untuk menjawab keraguan berbagai pihak akan kelayakan program, dan menilai ketercapaian program.

Suatu program dirancang untuk mengubah, memperkaya, meningkatkan, memperluas, atau meningkatkan ke-

hidupan peserta dan, dengan ekstensi, kualitas hidup dalam masyarakat secara keseluruhan. Pemerintah dan masyarakat memiliki hak untuk memastikan bahwa program menyampaikan apa yang mereka janjikan melalui evaluasi program berbasis standar [5]. Demikian program keaksaraan dasar dievaluasi berdasarkan standar pencapaian yang telah ditetapkan. Faktanya adalah bahwa intervensi yang dirancang untuk kepentingan masyarakat menjadi semakin kompleks dan rumit dari sudut pandang manajemen dan evaluasi [6]. Dibutuhkan evaluator yang kritis, bertanggung jawab, dan netral untuk dapat memberikan informasi dalam perspektif setiap pihak.

Hasil evaluasi mencerminkan masa lalu, sedangkan memanfaatkannya untuk mengambil keputusan kinerja program berkaitan dengan saat ini dan masa depan. Ketika hasil jangka panjang menjadi prioritas, maka diperlukan dukungan data yang akurat untuk menyakinkan adanya kesenjangan dalam pelaksanaan program untuk dinformasikan pada pengambil kebijakan masa depan atau untuk penerapan dalam skala yang lebih luas. Evaluasi akan lebih efektif bila dilakukan pada populasi yang cukup untuk meyakinkan hasil evaluasi dapat diterapkan pada berbagai bidang yang relevan, serta mempertimbangkan efektivitas intervensi dengan hasil yang diperoleh [7].

Penelitian ini didasarkan pada model evaluasi dengan pendekatan *Change Model*. Pada *change model*, suatu program diasumsikan memiliki kekuatan untuk mengubah melalui berbagai bentuk intervensi yang dilakukan terhadap program. Melalui intervensi pada suatu program akan mengubah faktor penentu sesuai tujuan dan dampak yang diharapkan. Pada model evaluasi ini, pendidik keaksaraan dasar merupakan faktor penentu yang dapat melakukan intervensi sekaligus menjadi intervensi

untuk mencapai tujuan pelaksanaan pendidikan keaksaraan dasar. Pendidik dapat melakukan intervensi melalui pembelajaran untuk mengubah peserta didik sesuai dengan harapan program dengan terlebih dahulu meningkatkan kompetensi (melalui pelatihan) untuk dapat melakukan intervensi yang diharapkan.

### Pendidik

Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kompetensi sebagai agen pembelajaran meliputi penguasaan kompetensi pedagogik, kepribadian, professional, dan sosial (PP 19/2015). Sedangkan menurut juknis pelaksanaan program pendidikan keaksaraan dasar, pendidik dinyatakan sebagai orang yang bersedia dan berkomitmen membantu membelajarkan peserta didik dengan kualifikasi.

1. Memiliki kompetensi keberaksaraan dan pengetahuan dasar tentang substansi materi yang akan dibelajarkan.
2. Mampu mengelola pembelajaran dengan kaidah-kaidah pembelajaran orang dewasa.
3. Pendidikan minimal SMA/ sederajat (khusus tutor sebaya cukup memiliki kemampuan baca tulis hitung dan bahasa Indonesia serta memiliki akses ke lingkungan komunitas sasaran)
4. Bertempat tinggal di atau dekat dengan lokasi pembelajaran.

Mengajar adalah kerajinan dan paling baik dipelajari melalui magang dengan mengamati seorang ahli. Menonton orang lain, dan mengamati diri sendiri dengan obyektif untuk melihat perkembangan diri sendiri dalam mengajar merupakan proses terbaik untuk memperoleh penguasaan di kelas [8].

Harapannya pendidik profesional mampu menilai tindakan yang benar dalam berbagai konteks berdasarkan fakta yang dapat diandalkan untuk penilaian daripada intuisi atau akal sehat. Seorang pendidik dituntut mampu membuat penilaian situasional yang baik, tidak bergantung pada desas-desus atau prasangka yang tidak mencerminkan kenyataan sesungguhnya. Bahkan seorang pendidik pun dituntut untuk mengembangkan aspek spiritualitas peserta [9]. Namun mengacu pada kerangka kerja konseptual yang dipikirkan dengan baik dan koheren, penelitian empiris yang dibuktikan, dan prinsip-prinsip etika yang dianggap baik untuk sampai pada keputusan dalam konteks kelas [8].

### **Keaksaraan Dasar**

Menurut Juknis juknis pelaksanaan program pendidikan keaksaraan dasar, pendidikan keaksaraan dasar adalah layanan pendidikan bagi warga masyarakat buta aksara latin usia 15-59 tahun, prioritas 45 tahun ke atas agar memiliki sikap, pengetahuan, keterampilan dalam menggunakan Bahasa Indonesia, membaca, menulis, dan berhitung, untuk mendukung aktivitas sehari-hari dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Melalui program ini, peserta didik diharapkan memiliki kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan berikut.

1. perilaku dan etika yang mencerminkan sikap orang beriman dan bertanggungjawab dalam berinteraksi dengan lingkungan keluarga, masyarakat, dan alam dalam kehidupan sehari-hari.
2. penguasaan pengetahuan faktual tentang cara berkomunikasi melalui Bahasa Indonesia dan berhitung dalam hidup bermasyarakat.
3. kemampuan menggunakan Bahasa Indonesia dan keterampilan berhitung untuk melakukan aktivitas sehari-hari

dalam kehidupan keluarga dan bermasyarakat.

Capaian peserta didik keaksaraan dasar ini juga mengacu pada konsep keaksaraan fungsional yang di adopsi UNESCO tahun 1978. Keaksaraan tidak semata kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, melainkan juga mempersiapkan individu untuk berperan dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan warga negara. Lebih lanjut, setiap individu berperan sebagai warga negara, anggota keluarga dan masyarakat, atau sebagai individu yang selalu mencari jawaban atas pertanyaan yang mereka hadapi seperti permasalahan lingkungan, sosial, moral, dan intelektual. Mereka juga dituntut secara terus-menerus menggunakan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung untuk mengembangkan diri dan lingkungan masyarakat [10].

### **Perubahan Sosial**

Perubahan sosial mencakup tiga aspek, yaitu kajian tentang perbedaan, kajian pada waktu yang berbeda, dan kajian pada sistem sosial yang sama. Seorang pendidik perlu memahami makna dan dampak dari fenomena perubahan sosial. Hal tersebut bertujuan agar pendidik dapat menghormati, menghargai dan menerima perbedaan latar belakang sosial, ekonomi, suku, agama, bahasa daerah, dan [11]. Menurut Macionis, perubahan sosial merupakan transformasi dalam organisasi masyarakat dalam pola berfikir dan dalam perilaku pada waktu tertentu [10]. Perubahan sosial yang diharapkan pada peserta didik keaksaraan dasar adalah adanya perubahan pola pikir yang akan berdampak pada aktivitas keseharian.

Mempelajari teori perubahan sosial diharapkan [12]:

1. memberikan alternatif cara menggunakan catatan empiris untuk menjelaskan hubungan antara variabel

yang dapat diidentifikasi yang menggambarkan kondisi nyata dan kondisi ideal yang diharapkan. Dapat berbentuk laporan tentang kausalitas muncul secara heuristik dari pengumpulan bukti induktif atau dari aplikasi deduktif dari kerangka konseptual yang lebih luas.

2. keterlibatan langsung dengan teori, semakin banyak kerja yang independen dari data empiris dan dapat mengembangkan pemahaman kita tentang ide, metode dan wacana.
3. sebagai salah satu upaya untuk mendorong maju pembentukan ilmu sosial sebagai bidang terpisah dari pembagian penyelidikan dan terus mendefinisikan dasar dari aktivitas intelektual.
4. Membantu memahami perubahan. Catatan masa lalu dapat didekati secara induktif sebagai indikasi inferensial masa depan. Gagasan pembangunan pasti mengandung linearitas metodologis implisit bahwa evolusi kehidupan manusia adalah proses universal yang selalu ada dalam kompleksitas dan diferensiasi yang semakin besar yang didasarkan pada perkembangan teknologi, kecakapan ideologis, spesialisasi kerja atau penanda lain dari kemajuan.

Ada beberapa hal yang menghambat perubahan sosial, antara lain beberapa mitos yang berkembang di masyarakat, yaitu:

1. Mitos penyimpangan. Masyarakat sebagai sistem sosial yang stabil dan terintegrasi sebagai suatu kondisi yang normal. Maka perubahan dianggap sebagai kondisi yang menyimpang.
2. Mitos trauma. Kegagalan suatu perubahan akan memberikan efek penolakan dari masyarakat terhadap perubahan selanjutnya.
3. Mitos perubahan satu arah dan utopia. Masyarakat bergerak menuju satu

tujuan yang sama dan menempuh jalan yang sama untuk mencapai tujuan tersebut. Dan asumsi bahwa masyarakat industri modern mencerminkan wujud tertingginya dalam prestasi manusia.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan evaluasi program dengan pendekatan *change model* yang dilakukan di Kabupaten Cirebon pada bulan April 2017. Penelitian ini mengambil sampel berdasarkan daerah, yaitu penyelenggara program di daerah pertanian dan daerah pesisir yang diharapkan memiliki kekhasan. Metode partisipatoris merupakan metode yang dilakukan pada penelitian dengan untuk mengkombinasikan fungsi ganda perolehan data dan pembentukan diantara pihak-pihak yang berpartisipasi.

Pada model evaluasi program *change model* didasarkan pada 3 aspek evaluasi, yaitu faktor penentu, intervensi, dan ketercapaian. Pendidik merupakan salah satu aspek sebagai faktor penentu keberhasilan program. Aspek yang diteliti peran pendidik keaksaraan dasar dalam mengubah sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik.

Prosedur pengumpulan data dilakukan sebagai berikut: (1) melakukan pengumpulan dokumen atau data-data yang diperlukan untuk melakukan telaah dokumen: (2) melakukan pengisian instrumen kepada sumber data; (3) melakukan pengecekan instrumen yang telah diisi oleh sumber data; (4) melakukan verifikasi data melalui wawancara, *focus group discussion*, dan observasi.

Setelah tahap pengumpulan data dilanjutkan dengan tahap analisis data dengan pendekatan kualitatif dengan dukungan data kuantitatif. Tahap analisis data dilakukan dengan (1) analisis data kualitatif melalui reduksi data paparan

data, pengambilan simpulan dan verifikasi; (2) analisis data kuantitatif dengan melihat hubungan antar aspek yang diteliti; (3) usulan rekomendasi berupa usulan terhadap pengembangan kompetensi dan pengembangan karir pendidik keaksaraan dasar.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan mengenai pendidik keaksaraan dasar didasarkan pada hasil penelitian di dua lembaga penyelenggara pendidikan keaksaraan dasar di Kabupaten Cirebon.

### Potret Pendidik Keaksaraan Dasar

Pendidik keaksaraan dasar memiliki latar belakang pendidikan yang disyaratkan. Sebanyak 75% menjadi pendidik karena mendapatkan tawaran dari penyelenggara program, 50% ingin memberikan manfaat bagi masyarakat, dan 25% untuk mengisi waktu luang. Atas layanan ini, mereka mendapatkan pengganti transport sebesar Rp.250.000/bulan selama program berlangsung. Pengaturan mengenai honor atau pengganti transport bagi pendidik menurut juknis pelaksanaan program maksimal sebesar 44,44% dari Rp4.500.000,- atau Rp1.999.800 untuk satu program (biasanya diselesaikan selama 6 bulan dengan jumlah peserta didik sebanyak 10 orang).

Umumnya mereka mengajar sebanyak 2 sampai 3 kali dalam seminggu, selebihnya mereka melakukan pekerjaan lain, sebagai pendidik pada program lain, maupun sebagai karyawan. Keuntungan bagi mereka adalah mereka tinggal di sekitar lokasi pembelajaran, sehingga mereka mengenal lebih baik latar sosial lingkungan peserta didik. Mereka juga menyatakan tantangan terbesar yang mereka hadapi adalah melayani peserta didik dengan beragam usia, tingkat pemahaman, dan latar sosial ekonomi

budaya. Selain itu mereka juga dituntut untuk memotivasi diri sendiri terlebih dahulu sebelum menjadi motivator bagi peserta didik.

Selama ini mereka mengajar menggunakan bahan ajar yang disediakan oleh penyelenggara, sehingga tidak mengherankan bila tingkat pemahaman terhadap kurikulum keaksaraan dasar masih dibawah 50%. Mereka mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, tetapi praktiknya tidak dilakukan. Pengajaran masih berorientasi pada pencapaian kemampuan membaca, menulis, dan berhitung semata.

Pendidik pada diskusi terfokus menyatakan, penilaian program, setidaknya mereka hanya dapat meluluskan 6 dari 10 orang peserta didik, namun kaitannya dengan petunjuk teknis yang menyatakan tingkat kelulusan minimal 80% maka mereka akan mengubah cara penilaian berikut kriteria penilaian. Umumnya mereka menilai berdasarkan tingkat kehadiran selama mengikuti program selain pencapaian membaca, menulis, dan berhitung setelah program. Hal ini diketahui oleh peserta didik dan mereka meyakini pada akhir program mereka akan mendapatkan sertifikat kelulusan seluruhnya. Ini yang menyebabkan mitos perubahan satu arah terjadi.

Seharusnya pendidik memastikan bahwa semua peserta didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan, termasuk, antara lain, melalui pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup berkelanjutan, hak asasi manusia, kesetaraan gender, promosi budaya perdamaian dan non-kekerasan, kewarganegaraan global dan penghargaan keanekaragaman budaya dan kontribusi budaya untuk pembangunan berke-

lanjutan sebagai kontekstualisasi keaksaraan dalam kehidupan peserta didik [13].

Sebagai agen perubahan pendidik setidaknya harus memenuhi 2 syarat, yaitu Pertama, kesepakatan yang adil bagi pendidik dalam hal pembayaran, persyaratan layanan dan status adalah dasar: pendidik yang dibayar rendah, demoralisasi, dan terlalu bekerja tidak mungkin menjadi agen perubahan. Kedua, konteks penting untuk membuat akun yang bersejarah dan realistis mengenai ketidaksetaraan dan hubungannya dengan perdamaian dan rekonsiliasi, oleh karena itu intervensi pendidik perlu dikembangkan dari konteks lokal dan nasional, tidak diimpor dan diadaptasi.

### **Penyiapan Pendidik Keaksaraan Dasar**

Salah satu upaya penyiapan pendidik keaksaraan dasar adalah dengan memberikan pelatihan kepada calon maupun pendidik keaksaraan dasar untuk memahami program dengan baik dan untuk meningkatkan kemampuan profesional personal. Sebanyak 50% pendidik menyatakan belum mendapatkan pelatihan untuk menjadi pendidik, dan mereka lebih banyak melakukan pekerjaan sebagai pendidik dengan langsung praktik mengajar dengan penjelasan dari penyelenggara program.

Materi pelatihan yang mereka perlukan sebagai pendidik keaksaraan dasar meliputi materi kebijakan kurikulum, merancang silabus dan RPP, menyusun bahan ajar, analisis kontek/kebutuhan, dan pembelajaran orang dewasa. Menurut mereka pelaksanaan pelatihan sebaiknya dalam bentuk workshop yang lebih banyak praktik dibandingkan dengan ceramah.

Pelatihan yang diberikan selayaknya harus mampu memberikan gambaran kepada pendidik mengenai “kebutuhan, tujuan, sumber daya yang

tersedia, dan praktik mengajar yang diharapkan dalam program keaksaraan orang dewasa” [3]. Selain itu perlu ada pemahaman dan perubahan paradigma bahwa program membutuhkan berbagai sumber daya untuk mendukung pedagogi individual, yang memberikan implikasi keterlibatan masyarakat untuk mendukung program, antara lain dengan dikaitkan dengan pekerjaan dan kehidupan peserta didik.

Selain pelatihan, diperlukan pelibatan perpustakaan untuk memberikan akses kepada pendidik untuk meningkatkan kemampuan secara mandiri, selain memberikan akses tidak terbatas kepada peserta didik untuk meningkatkan kemampuan membaca sesuai bidang keilmuan yang diminati. Penyediaan bahan bacaan yang diminati menurut hasil penelitian sangat penting dalam mempertahankan partisipasi peserta didik dalam program keaksaraan [14]. Penggunaan perpustakaan ini sebagai media bagi pendidik maupun peserta didik untuk belajar hal-hal baru dan menemukan hal-hal baru yang mengubah cara pandang mereka secara bersama-sama.

Sebagai pendidik, perlu mengenali masalah peserta didik usia dewasa terkait motivasi dan harapan orang lain dan motivasi diri sendiri untuk dapat melakukan dengan baik. Umumnya orang dewasa memiliki kesulitan dalam pemilihan topik, mengorganisasikan materi, dan berfikir kritis, serta melakukan hubungan dengan pendidik dengan baik bereaksi terhadap hasil evaluasi yang diberikan [15].

### **Harapan dan Tantangan Pendidik Keaksaraan Dasar**

Harus diakui bahwa di semua studi kasus, pendidik merupakan kekuatan potensial yang potensial untuk perubahan: mereka berada di hampir setiap desa dan dusun, mereka sering

merupakan komponen terbesar dari layanan sipil nasional, memiliki potensi terbesar untuk mengubah dan meningkatkan peluang hidup peserta didik yang lebih baik. Mereka adalah anggota masyarakat sipil yang dihormati dan terpelajar, dan meskipun kondisi yang sering sulit di mana mereka bekerja, sangat mempertahankan keyakinan yang kuat dan komitmen untuk pekerjaan mereka. Tugas pembuat kebijakan adalah memaksimalkan potensi ini melalui pemikiran yang matang, konteks yang sensitif, dukungan yang adil, manajemen dan pelatihan sangat diperlukan sekaligus tantangan tersulit [13].

Pendidik keaksaraan dasar harus memahami berbagai isu dan perkembangan konsep keaksaraan dasar untuk dapat dipraktikkan dalam pembelajaran. Berikut ini praktik keaksaraan dasar yang diharapkan dapat dipraktikkan untuk dapat membawa perubahan bagi peserta didik [2]:

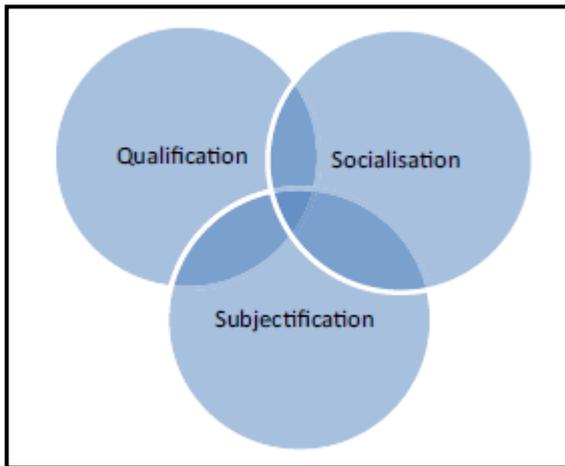
1. Resolusi 1710 (PBB 1961) secara eksplisit menghubungkan pendidikan dengan pembangunan ekonomi. Demikian halnya dengan keaksaraan, keaksaraan diarahkan dilakukan secara fungsional sesuai dengan kehidupan peserta didik. Diyakini bila ini bisa dilakukan, dampak dari keaksaraan bisa melebihi pendidikan dasar.
2. Kemajuan program keaksaraan telah disertai (meskipun tentu tidak disebabkan) oleh dua perkembangan konseptual yang lebih baru, yang menekankan berbagai makna kontekstual dan tujuan literasi, dan yang lain melihat semua perubahan pendidikan melalui lensa hak asasi manusia bukan sebagai faktor produksi ekonomi.
3. Keaksaraan adalah kemampuan untuk mengubah “dengan menerapkan keterampilan yang tepat dalam situasi

spesifik keterlibatan dengan teks ... Di mana ada kemampuan, orang tersebut mampu melakukan apa yang ingin mereka lakukan baik di rumah, di tempat kerja, di sosial atau konteks politik, atau sebagai dukungan untuk pembelajaran lebih lanjut”.

Kadang-kadang pekerjaan pendidik dilemparkan seolah-olah mereka adalah ‘teknisi eksekutif’ [8]. Diberitahu secara preskriptif oleh orang lain apa yang harus dilakukan, tanpa perlu memahami mengapa mereka diminta untuk melakukannya. Pandangan ini masuk akal jika bentuk standar praktik kelas tertentu dapat diketahui bekerja lebih efektif daripada yang lain, tanpa pertanyaan dan tanpa konteks [8]. Untuk konteks keaksaraan dasar pendidik seperti ini kurang pas, dibutuhkan pendidik yang dapat membantu peserta didik untuk mengatasi tuntutan yang merupakan karakteristik masyarakat berbasis pengetahuan. Mereka harus mengajar dengan cara yang sensitif terhadap konteks global dan lokal [16].

Pendidik sebagai agen perubahan perlu memahami, bahwa fungsi dan tujuan pendidikan meliputi 3 hal, yaitu kualifikasi, sosialisasi, dan subyektifitas. Kualifikasi berkaitan dengan transmisi dan perolehan pengetahuan, keterampilan, dan disposisi. Hal ini penting karena memungkinkan peserta didik untuk 'melakukan' sesuatu - hal itu membuat mereka memenuhi syarat. Dimensi sosialisasi yang sebagian merupakan tujuan eksplisit dari pendidikan tetapi, seperti yang ditunjukkan dalam penelitian sosiologi pendidikan (pendidik dan peserta didik tanpa sadar mereproduksi struktur sosial yang ada, pembagian dan ketidaksetaraan) yang berkaitan dengan tradisi dan cara menjadi dan melakukan, seperti budaya, profesional, politik, tradisi agama, dll. Subyektifitas, peserta didik menjadi ada sebagai subyek inisiatif dan

tanggung jawab daripada sebagai objek dari tindakan orang lain [17].



**Gambar 1.** Fungsi dan Tujuan Pendidikan [17]

Ide-ide pendidikan Freire tidak hanya tentang membangun ruang untuk refleksi kritis tetapi juga menekankan memberikan siswa kesempatan untuk campur tangan dalam realitas ini melalui tindakan kolektif. Oleh karena itu, teori Freire memiliki potensi untuk berkontribusi pada kerangka teoritis yang menggambarkan bagaimana kelompok marginal melalui proses pembebasan kognitif, mengembangkan kesadaran oposisi, dan belajar bahwa mereka memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan [18].

Sementara pendidikan tradisional menghargai kemajuan dan akuntabilitas individu, pendidik kritis menekankan pembelajaran kolektif sebagai proses yang harus dilalui oleh para siswa bersama-sama [19]. Edward Chambers membuat perbedaan yang jelas antara pendidikan yang terjadi melalui pengalaman sehari-hari dan “pengetahuan teoritis” yang datang dari sekolah - yang menurutnya benar-benar terputus dari kenyataan dan bukan diperlukan untuk aksi sosial [18]. Pembelajaran sebaiknya:

1. pendidikan harus terbuka sementara juga disengaja dan direktif. Seperti yang ditulis Freire, dalam masalah-

masalah siswa pendidikan adalah “tidak lagi pendengar yang jinak”. Mereka sekarang adalah rekan penyelidik penting dalam dialog dengan guru.

2. keseimbangan antara *theoria* (teori akademis) dan *phronesis* (pengetahuan sosial atau kebijaksanaan praktis) dan mengembangkan proyek pendidikan emansipatif yang dimulai dengan pengetahuan siswa, tetapi juga menghubungkan pengetahuan itu dengan teori kritis.
3. bertujuan untuk menghubungkan kelompok dan peserta didik yang terpinggirkan ke proyek hegemonik alternatif. berguna untuk mengonseptualisasikan peran politik seorang pendidik atau pengorganisasi komunitas. Perlu menguraikan aktivitas intelektual yang ada di setiap orang untuk mengembangkan inti akal sehat yang ada dalam “akal sehat” dan menghubungkan pemahaman baru ini dengan visi sosial alternatif.

## SIMPULAN

Sebagai ujung tombak keberhasilan program keaksaraan dasar, ada banyak harapan yang menjadi beban bagi pendidik keaksaraan dasar. Di satu sisi mereka belum mendapatkan kompensasi yang sesuai dengan harapan yang diberikan. Tantangan yang mereka hadapi cukup berat dengan melayani peserta didik dengan beragam usia, kemampuan, dan latar sosial budaya ekonomi.

Pendidikan keaksaraan yang terus berkembang dalam konsep dan tuntutan implementasi, namun masih belum diikuti dengan peningkatan kompetensi pendidiknya. Pelatihan yang dilakukan selama ini belum mampu mengubah paradigma pendidik untuk menjadi agen perubahan. Pendidik saat ini masih terbatas perannya untuk menjalankan program sesuai juknis yang diberikan dan belum termotivasi

untuk meningkatkan kemampuan profesionalisme dikarenakan status mereka yang masih belum jelas.

Pengorganisasian berbagai sumber belajar yang tersedia di lingkungan sekitar, misalnya perpustakaan juga dapat menjadi media dalam membuat suatu perubahan cara pikir baik oleh peserta didik maupun pendidik itu sendiri. Pendidikan keaksaraan dasar membutuhkan dukungan berbagai pihak agar dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

### REKOMENDASI

Peningkatan peran pendidik keaksaraan dasar sebagai agen perubahan membutuhkan dukungan dari pemerintah untuk menata ulang kembali sistem pelatihan yang selama ini diberikan. Pembinaan sistem pelatihan tidak cukup, bila tidak diimbangi dengan penataan dan pengakuan status mereka sebagai pendidik keaksaraan dasar. Perlu dipikirkan mengintegrasikan status mereka tidak sebagai pendidik keaksaraan dasar semata, tetapi sebagai pendidik pendidikan nonformal yang terintegrasi dengan program pendidikan nonformal lainnya.

Pemerintah maupun penyelenggara perlu memfasilitasi institusi atau lembaga atau masyarakat untuk mendukung program keaksaraan dasar. Dukungan berbagai pihak ini akan membantu perubahan, paling tidak cara pikir bagi peserta didik keaksaraan dasar.

Bentuk motivasi yang diberikan kepada peserta didik untuk berubah, tidak akan berarti bila hanya sebatas lisan, perlu ada tindakan konkrit. Pendidik diharapkan mampu merancang pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik yang dapat langsung diaplikasikan dalam kehidupan keseharian.

### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan. (2016). *Petunjuk Teknis Program Pendidikan Keaksaraan Dasar dan Prosedur Pengajuan Bantuan Tahun 2016*.
- [2] Post, David. (2016). *Adult Literacy Benefits? New Opportunities for Research into Sustainable Development*. *Int Rev Educ* (2016) 62:751–770. DOI: 10.1007/s11159-016-9602-5.
- [3] Wells, Jaclyn M. (2014). *Investigating Adult Literacy Programs through Community Engagement Research: A Case Study*. *Community Literacy Journal*. ISSN: 1555-9734. Volume 8 (2), 49-67.
- [4] Wulandari, Apriyanti. (2017). *Tesis: Evaluasi Program Pendidikan Keaksaraan Dasar: Studi Kasus di Kabupaten Cirebon (Penerapan Change Model Program Evaluation)*.
- [5] Shower, Saad F. (2013). *Accreditation and Standards-Driven Program Evaluation: Implications for Program Quality Assurance and Stakeholder Professional Development*. *Qual Quant* 47:2883–2913. DOI: 10.1007/s11135-012-9696-1.
- [6] Dauphinee, W. Dale. (2015). *The Role of Theory-Based Outcome Frameworks in Program Evaluation: Considering The Case of Contribution Analysis*. *Medical Teacher* 2015, 37: 979–982. ISSN 0142-159X print/ISSN 1466-187X online/15/0110979–4. DOI: 10.3109/0142159X.2015.1087484.
- [7] Maynard, R., Goldstein, N., & Nightingale, D. S. (2016). *Program and Policy Evaluations in Practice: Highlights from the Federal Perspective*. In L. R. Peck (Ed.), *Social experiments in practice: The what, why, when, where, and how of experimental design & analysis*. New

- Directions for Evaluation No. 152: 109–135. DOI: 10.1002/ev.20209.
- [8] Orchard, Janet, Christopher Winch. (2015). *What Training Do Teachers Need? Why Theory is Necessary to Good Teaching*. Impact 2015 Issue: 22 Page: 1-43. DOI: 10.1111/2048-416X.2015.12002.x
- [9] Sunani. (2017). *Implementasi Pendidikan Multikultural dalam Budaya Sekolah di SMA Terpadu Krida Nusantara Bandung*. Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, Volume 26, Nomor 1, Juni 2017. DOI: 10.17509/jpis.v26i1.2224
- [10] Pusat Kurikulum dan Perbukuan. (2014). *Naskah Akademik PNF Program Keaksaraan*.
- [11] Andriani, Ana. (2016). *Melatih Kearifan Intelektual, Emosional, dan Spiritual Pemuda Guna Menghadapi Pasar Bebas Asia Tenggara (Masyarakat Ekonomi Asean - MEA)*. Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, Vol. 25, No. 2, Edisi Desember 2016. DOI: 10.17509/jpis.v25i2.6187
- [12] Martono, Nanang. (2014). *Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, dan Poskolonial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- [13] Jacoby, Tim, Uma Kothari. (2014). *Introduction: Bringing Social Theory back into Issues of Development*. Progress in Development Studies 14, 3 (2014) pp. 215–220. DOI: 10.1177/1464993414521337
- [14] Novelli, Mario and Yusuf Sayed. (2016). *Teachers as Agents of Sustainable Peace, Social Cohesion and Development: Theory, Practice & Evidence*. Education as Change Journal. Volume 20 (3), 15–37. DOI: 10.17159/1947-9417/2016/1486.
- [15] J Shore et al. (2015). *Development of an Evidence-Based Reading Fluency Program for Adult Literacy Learners*. Reading Psychology, 36:86–104. ISSN: 0270-2711 print / 1521-0685 online. DOI: 10.1080/02702711.2013.835294.
- [16] Fernandez, Rebeca, Joy Kreeft Peyton, Kirsten Schaetzel. (2017). *A Survey of Writing Instruction in Adult ESL Programs: Are Teaching Practices Meeting Adult Learner Needs?* Journal of Research and Practice for Adult Literacy, Secondary, and Basic Education. Volume 6, Number 2: 5-20.
- [17] Modiba, Maropeng, Sandra Stewart. (2014). *Understanding Classroom Practice: Ethnographic Reflection as A Methodological Tool for Professional Development*. Ethnography and Education Vol. 9, No. 2, 140–152. DOI: 10.1080/17457823.2013.841081
- [18] Biesta, Gert. (2015). *What is Education for? On Good Education, Teacher Judgement, and Educational Professionalism*. European Journal of Education, Vol. 50, No. 1, 75-87. DOI: 10.1111/ejed.12109
- [19] Tarlau, Rebecca. (2014). *From A Language to A Theory of Resistance: Critical Pedagogy, The Limits of “Framing,” and Social Change*. Educational theory Volume 64 Number 4: 369-392. ISSN: 0013-2004. DOI: 10.1111/edth.12067